

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berbicara tentang bagaimana efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina pada tahun 2016-2018 dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan atau lebih tepatnya di perairan Sulu. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara pada rentang waktu tersebut yang sekaligus juga dapat menjawab rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menghadapi isu pembajakan kapal di wilayah perbatasan pada tahun 2016-2018 ?

Berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Filipina tentu bukan tanpa alasan. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama guna meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan keduanya terutama untuk keamanan dan pertahanan di sekitar wilayah perairan yang menjadi perbatasan kedua negara. Hal tersebut dilakukan karena mulai banyaknya permasalahan yang hadir di wilayah tersebut mulai dari penyelundupan manusia, narkoba, illegal fishing hingga yang paling menarik perhatian adalah permasalahan pembajakan kapal yang melintas di perairan tersebut.

Permasalahan pembajakan kapal ini sangat menarik perhatian bukan hanya media dan masyarakat saja, melainkan juga tentunya pemerintah dan kepala negara Indonesia dan juga Filipina karena bukan hanya melakukan pembajakan

kapal saja, namun para pelaku juga tidak segan untuk melakukan pembunuhan terhadap awak kapal yang menjadi korban pembajakan. Melihat hal tersebutlah, Filipina melalui kepala negara yang baru saja dilantik yakni Rodrigo Duterte mulai melakukan pembicaraan serius dengan pemerintah negara Indonesia. Inisiatif tersebut disambut baik oleh Indonesia karena merasa bahwa permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan NKRI. Lebih dari itu, jatuhnya korban jiwa yang merupakan warga negara Indonesia juga menjadi latar belakang terjalinnya kerjasama ini karena dianggap bahwa permasalahan ini telah mengganggu keamanan warga negara Indonesia dan juga Filipina. Mulai dari saat itulah kedua pemerintahan baik itu Indonesia dan Filipina sepakat untuk bersama-sama melakukan tindakan menghadapi permasalahan pembajakan kapal tersebut. Melalui kerjasama yang dijalin, diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan bukan hanya untuk kedaulatan kedua negara saja, tetapi juga agar dunia internasional tidak memiliki pandangan atau citra yang buruk terhadap kedua negara ini apalagi sektor perairan menjadi hal yang cukup penting baik dari segi perdagangan dan juga mobilitas industri lainnya.

Untuk mencapai hal tersebut, tentu membutuhkan kerjasama dan pemahaman yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pihak pemerintah Indonesia dan juga pihak pemerintah Filipina. Selain itu juga diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan yang baik pula karena permasalahan yang dihadapi sangat erat kaitannya dengan kekuatan pertahanan dan keamanan dari masing-masing pihak.

Penelitian ini akan melihat bagaimana berbagai kerjasama yang telah dijalin antara Indonesia dan Filipina tersebut berjalan dan bagaimana hasilnya apakah sudah efektif atau belum dan berhasilkah tujuan dan visi yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas rezim kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Filipina dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara, atau lebih tepatnya di Kawasan perairan Sulu.

Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas rezim kerjasama tersebut, peneliti melakukan analisis dengan melihat bagaimana koordinasi dan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara hingga menghasilkan beberapa data yang menunjukkan jumlah kejadian pembajakan kapal di Kawasan perairan Sulu dari tahun 2016-2018. Selain itu, peneliti juga menganalisis kerumitan masala pada rezim kerjasama ini. Koordinasi dan implementasi serta hasil yang didapatkan dari kerjasama tersebut dan juga analisis kerumitan masalah menyimpulkan bahwa rezim kerjasama Indonesia dan Filipina berada di level rendah yaitu level 2. Adapun level kolaborasi tingkat 2 yaitu, Adanya koordinasi tindakan berdasarkan aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit tetapi dengan implementasi sepenuhnya di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan yang dilakukan. Skala tersebut didapatkan dari analisis yang digunakan dalam teori Efektivitas Rezim yang melihat tingkat efektivitas suatu rezim dari tipe kerumitan masalah dan juga kapasitas penyelesaian masalah dalam rezim tersebut, yang mana pada kerjasama Indonesia dan Filipina ini menunjukkan efektivitas yang rendah karena kerumitan

masalah yang masih cukup tinggi dan masih banyak terjadi, juga kapasitas penyelesaian masalah yang tidak cukup kuat.

Rezim Kerjasama Indonesia dan Filipina juga dikatakan tidak efektif karena didalam mekanisme yang dijalankan oleh anggota rezim tidak menunjukkan behavioral change atau perubahan perilaku dari aktor anggota. Hal ini dibuktikan dengan masih ada negara anggota yang tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti negara Filipina yang masih tetap terjadi konflik di dalam negeri yang menjadi penyebab terus lahir dan berkembangnya kelompok-kelompok separatis dan para pembajak kapal. Tidak adanya technical optimum atau teknik penyelesaian masalah paling optimal dalam rezim kerjasama ini, sehingga kerumitan masalah masih lebih besar daripada kapasitas penyelesaian masalahnya.

4.2. Rekomendasi

Dalam penelitian ini tentu masih memiliki beberapa kekurangan baik itu topik atau pembahasan penelitian maupun juga terhadap substansi permasalahan yang terjadi. Kekurangan dalam penelitian ini tentu terdapat pada cakupan waktu yang hanya mengambil rentang waktu dari tahun 2016 sampai 2018. Hal tersebut tentu menjadi kekurangan karena diketahui permasalahan pembajakan kapal ini sudah terjadi sejak sebelum tahun 2016 di beberapa titik di Kawasan Asia Tenggara yang dapat menjadi asal mula berkembangnya kelompok bajak laut di sekitar perairan Sulu yang menjadi perbatasan negara Indonesia dan Filipina. Selain itu, secara substansial kerjasama kedua negara dalam menghadapi permasalahan pembajakan kapal ini harus mendapat perhatian lebih besar lagi

karena walaupun pada dasarnya berhasil menciptakan situasi yang kondusif bagi aktivitas pelayaran, namun angka pembajakan kapal di perairan Sulu masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian kedua belah pihak karena dikhawatirkan kelompok bajak laut tersebut dapat kembali berkembang dengan kemampuan yang baru dan kekuatan yang baru pula di kemudian hari.

